

WUJUDKAN HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perusahaan Diharapkan Realisasikan Struktur Skala Upah

YOGYA (KR) - Struktur skala upah yang diatur oleh pemerintah dinilai mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Oleh karena itu perusahaan diharapkan mampu merealisasikan hal tersebut kepada para karyawannya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Maryustion Tonang, menjelaskan pemberian upah yang adil adalah salah satu kunci untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kemajuan perusahaan. "Hal ini tentu akan berdampak positif baik untuk pegawai maupun bagi perusahaan, seperti mengurangi tingkat *turnover* karyawan, dengan kurangnya *turnover* tentunya berdampak pada biaya untuk melakukan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan," jelasnya, Rabu (16/3).

Sebagai upaya untuk mengingatkan kembali kewajiban perusahaan tersebut, Pemko melakukan diseminasi informasi-informasi krusial terkait ketenagakerjaan, termasuk pemberitahuan akan penentuan struktur dan

skala upah. Salah satunya berupa workshop struktur skala upah dengan melibatkan unsur perusahaan.

Maryustion tak memungkiri masih adanya kebijakan pengupahan di perusahaan yang bertumpu pada upah minimum tanpa mempertimbangkan bobot jabatan dari masing-masing karyawan. "Padahal perlu diketahui, upah minimum diukur berdasarkan pada kebutuhan hidup layak pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun atau antara 0-12 bulan," ujarnya.

Upah minimum diukur berdasarkan pada kebutuhan hidup layak pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun dan berkeluarga. Hal ini karena pekerja yang telah bekerja lebih dari 12 bulan, pengupahan dilakukan dengan menyusun struktur dan skala upah.

Maryustion membeberkan, dalam

penerapan struktur dan skala upah telah tertuang pada beberapa aturan seperti Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. "Bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi, bahkan sampai pembekuan kegiatan usaha," urainya.

Dirinya pun berharap, terbangun komitmen bagi para pemberi kerja untuk memenuhi ketentuan hukum serta jaminan fasilitas-fasilitas penunjang kesejahteraan pegawai di lingkungan kerja. "Semuanya ini tentunya akan bermuara pada peningkatan produktivitas, kemakmuran dan kebahagiaan pekerja, kemajuan dan pertumbuhan perusahaan, serta terciptanya perkembangan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan di Kota Yogyakarta," katanya. **(Dhi)-f**

DIRENCANAKAN DIBUKA WAGUB DIY Pilih Kepengurusan Baru, ICMI DIY Gelar Muswil



KR-Franz Boedisoeakanto

Panitia Muswil ICMI DIY saat bersilaturahmi dengan Direktur Utama PT BP KR M Wirmon Samawi SE MIB.

YOGYA (KR) - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIY akan mengadakan musyawarah wilayah (Muswil) di Fakultas Kedokteran UAD pada Sabtu (19/3). Karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, panitia sepakat untuk mengadakan Muswil dengan model hybrid (luring dan daring). Muswil ICMI DIY dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

"Salah satu agenda penting dalam Muswil ICMI kali ini adalah pemilihan pengurus yang baru. Rencananya Muswil ini akan dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) DIY, Sri Paku Alam X. Selain Wagub DIY, pada Muswil nanti juga akan ada pengarahan dari Ketua ICMI Pusat Arif Satria. Sedangkan kedatangan kami ke SKH Kedaulatan Rakyat selain untuk bersilaturahmi juga minta dukungan dan doa agar pelaksanaan Muswil ICMI bisa lancar," kata Sekretaris Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIY, Wahyudi didampingi Ketua Steering Committee (SC) Muswil ICMI DIY, Ahmad Charris Zubair, Dr Akbar Susanto (Ketua ICMI Sleman), Dr

Sri Roviana (Dept Perempuan dan Anak ICMI DIY), Eko (Orda Bantul) dan Herwanto (Orda Kota). Kedatangan mereka diterima Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat M Wirmon Samawi SE MIB, didampingi Imam Satriadi (Direktur Keuangan), Bas-koro Jati Prabowo (Direktur Produksi) dan Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Octo Lampito MPd di ruang Dirut, Rabu (16/3).

Ahmad Charris Zubair mengatakan, dalam situasi sekarang keberadaan ICMI memiliki peran cukup penting dalam menyelesaikan program pembangunan dari pemerintah. Menyadari akan hal tersebut ICMI DIY selalu berupaya memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran, penyampaian ide atau gagasan maupun beberapa hal lainnya. Semua itu dilakukan dengan harapan keberadaan ICMI bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Begitu pula dengan kepengurusan ICMI DIY yang baru nanti diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih luas bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. **(Ria)-f**

JELANG RAMADAN, FOKUS TATA KEINDAHAN SUARA Masjid di Yogya Tak Pernah Langgar SE Menag

YOGYA (KR) - Masjid di Kota Yogyakarta dipastikan tidak pernah melanggar surat edaran (SE) Menteri Agama (Menag) terkait penggunaan peneras suara. Hal ini karena berdasarkan hasil pengukuran suara, tidak ada yang melebihi 100 desibel (db) seperti batas maksimal yang ditentukan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nur Abadi, menjelaskan aturan terkait penggunaan peneras suara di masjid dan musala sebenarnya sudah ada sejak tahun 1974. "Tetapi aturan itu tidak sedetail yang sekarang. Kalau dulu batasannya jangan sampai mengganggu lingkungan, sekarang diperingi sampai maksimal 100 db itu," jelasnya di sela sosialisasi SE Menag Nomor 5/2022 di Masjid Pangoran Diponegoro kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (16/3).

Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Kementerian Agama Kota Yogyakarta

dengan Baznas Kota Yogyakarta. Sasarannya ialah para takmir masjid yang ada di Kota Yogyakarta. Jumlah masjid di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 548 masjid.

Nur Abadi menambahkan, saat SE Menag 5/2022 diberlakukan sejak Februari lalu, tidak ada perubahan yang signifikan. Pasalnya, kekuatan suara dengan mikropon luar yang digunakan masjid di Kota Yogyakarta masih jauh di bawah 100 db. "Sampai hari ini tidak ada penolakan sama sekali. Takmir hanya mencari penjelasan ke kami mengukur 100db itu seperti apa. Ternyata selama ini di kota tidak sampai pada 100db dan tidak ada persoalan," tandasnya.

Oleh karena itu, pada sosialisasi kali ini justru lebih menekankan pada tata keindahan suara. Terutama dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan agar suasana peribadahan semakin menentramkan masyarakat. Harapannya ketika malam takbiran,

penggunaan peneras suara luar hanya sampai pukul 22.00 WIB. Sedangkan selebihnya menggunakan peneras suara dalam.

Kepala Baznas Kota Yogyakarta Syamsul Azhari, menambahkan penataan akustik yang baik sangat menentukan keindahan suara yang dihasilkan. Pihaknya pun telah bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk membantu takmir masjid dalam menata akustik. "Kami juga memiliki armada mobil untuk membantu masjid memperbaiki speaker yang rusak," katanya.

Sementara Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, mengaku SE Menag tersebut tidak ada sesuatu yang berbeda dari yang selama ini sudah dilakukan. Justru aturan tersebut merupakan penguatan agar kualitas suara semakin bagus dan menghasilkan keindahan dalam siar Islam. **(Dhi)-f**

Manasik Kesehatan Haji Sepanjang Waktu Sehat Bahagia di Masa Tunggu Keberangkatan

YOGYA (KR) - Mempersiapkan kesehatan calon jemaah haji tidak boleh terhalang masa pandemi Covid-19. Hal itulah yang tetap dilakukan Forum Petugas Kesehatan Haji Indonesia (FPKHI) DIY yang tetap mengadakan pembinaan sesuai program Puskes haji meski masih dalam kondisi pandemi.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring mengungkap jargon 'Manasik Kesehatan Haji: educate, educate dan educate' pada akhir pekan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, FP-

KHI DIY bersinergi dengan Bidang PHU Kemenag DIY untuk bersama mengawal istitah kesehatan haji.

Secara khusus, Ketua DPP FPKHI Ns Turiman mengapresiasi kegiatan rutin FP-KHI DIY yang diberi nama 'Manjing Waktu' tersebut. Tema 'Sehat bahagia di masa tunggu keberangkatan ibadah haji' mengajak calon jemaah untuk selalu semangat walaupun masih dalam ketidakpastian keberangkatan ibadah haji," kata Ns Turiman.

Kabid PHU Kanwil Kemenag DIY H Ahmad Fauzi

SH MA menjelaskan, walaupun belum ada pengumuman resmi penyelenggaraan ibadah haji, jemaah diimbau selalu mengikuti update informasi dan aktif dalam kegiatan manasik haji maupun manasik kesehatan untuk haji sehat haji mandiri yang mandiri.

Kegiatan yang dipandu Retno Murniati SST dari RSJ Grhasia Yogyakarta tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr Imran Hamdani MKM selaku penulis buku 'Ibadah Haji di Masa Pandemi' yang berdinasi di Puskes haji, dr

Muntafiqoh SpS dan Ns Istiningrum.

"Latihan fisik untuk menjaga kebugaran tubuh jemaah haji dengan membiasakan jalan kaki setiap hari," kata Dr Imran.

(Feb)-f

Polda DIY - UCY Percepat Vaksinasi Menuju Kuliah PTM

YOGYA (KR) - Kegiatan optimalisasi percepatan vaksinasi terus digeber Pol-da DIY. Saat ini sudah sekitar 16.500 vaksinasi sudah diberikan, termasuk di Kampus Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) yang ditargetkan 1.500 dosis untuk Vaksin 1, 2, 3 yang diikuti mahasiswa, karyawan, dosen dan masyarakat umum.

"Vaksinasi dan prokes merupakan syarat utama dan mutlak agar pandemi menurun, saat ini sudah mulai terasa penurunannya, di DIY kemarin hanya 850 kasus turun jauh dibanding minggu lalu, sembuh 1500 orang, dan meninggal 20 orang menunjukkan penurunan signifikan," ucap Wakapolda DIY, Brigjen Pol R Slamet Santoso SH SIK saat melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi, Rabu (16/3) di Kampus UCY, Umbulharjo, Yogya.

Wakapolda bersama jajarannya diantaranya Kabid-dokkes Polda DIY Kombes Pol dr Is Sarifin SpB, Wakapolda Yogyakarta AKBP Fahmi



KR-Juvinarto

Rektor UCY turut menerima vaksinasi dengan disaksikan Wakapolda DIY, Kabidokkes Polda DIY, dan Wakapolresta Yogya.

Arifrianto SH SIK MH MSI disambut Rektor UCY Dr Ciptasari Prabawanti SPSi MSc PhD yang juga menjadi peserta vaksinasi.

"Dengan prokes dan vaksinasi harapannya terjadi penurunan terus sehingga level PPKM di Yogya bisa segera turun jadi level 3, 2 atau bahkan 1," ujarnya.

Disebutkan sinergi Polri (Polda DIY), TNI, Dinas Kesehatan dalam vaksinasi dalam vaksinasi di sekolah/kampus agar kondusif dan bisa dilaksanakan Pembe-

lajaran Tatap Muka (PTM). "Saat ini di DIY, vaksinasi dosis 1 sudah 100 persen, dosis 2 mencapai 98 persen, dan dosis 3 di urutan ke-3 nasional mencapai 15,6 persen, serta lansia 85 persen," jelas Wakapolda.

Sedang Rektor UCY menyatakan dengan vaksinasi di kampus ini maka mahasiswa, staf, dosen dan masyarakat sekitarnya sudah komplit menjalani vaksinasi dan terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok). **(Vin)-f**

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

Segera Miliki 'Big Data' Skuter Listrik

YOGYA (KR) - Tren bisnis skuter atau otoped listrik mulai marak. Hal ini menjadi sorotan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta yang membidangi masalah perekonomian. Pemkot pun didesak segera memiliki 'big data' tentang skuter listrik.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogyakarta R Krisma Eka Putra SE, dalam rapat kerja Komisi B ia menyampaikan ada dua hal yang perlu dipahami dalam menghadapi tren bisnis skuter listrik ini. "Di satu sisi, ini merupakan satu terobosan alternatif fasilitas untuk wisatawan, di sisi lain banyak netizen yang mengeluhkan tentang keberadaannya karena dianggap mengganggu lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, karena sering kali para penyewa ugal-ugalan dan tidak menaati peraturan lalu lintas yang berlaku khususnya di kawasan Tugu, Malioboro dan Titik Nol," urainya.

Berkaitan dengan hal ini, Pemkot perlu memberlakukan peraturan yang jelas. Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45/2020, kendaraan berbasis listrik merupakan kendaraan khusus. Karenanya, kendaraan tersebut harus melintas di jalur khusus atau kawasan tertentu.

"Sementara dibuat saja dulu semacam MOU dengan para pelaku usaha. Misalnya, jam berapa boleh beroperasi, rute yang boleh atau tidak dilalui, batasan jumlah

**R Krisma Eka Putra SE
Fraksi Partai Gerindra**



KR-Istimewa

penyedia jasa di kawasan Tugu, Malioboro dan Titik Nol. Jangan tunggu viral, karena ada kasus yang terjadi dahulu baru dibuat peraturan," tegasnya.

Krisma menilai, ketika tidak ada peraturan yang jelas sejak awal, jumlah penyedia jasa akan semakin banyak. Jika sudah banyak, akan membentuk komunitas, dan dapat dimungkinkan memiliki kekuatan politik untuk bargaining dengan pemerintah ketika akan ditertibkan di kemudian hari. "Ketika nanti ditertibkan, mereka akan meminta relokasi, siapa yang rugi? Pemkot dan masyarakat Kota Yogya itu sendiri. Karena pasti akan menggunakan APBD dalam prosesnya, yang seyogyanya APBD bisa dimaksimalkan di sektor yang lain, seperti pendidikan, kese-

hatan dan kesejahteraan sosial," imbuhnya.

Di samping itu, tidak fair rasanya ketika kita baru saja merelokasi PKL, lalu ada unit bisnis lain yang dijalankan di kawasan Tugu, Malioboro dan Titik Nol tanpa peraturan jelas. "Mereka kan sama-sama pedagang, cuma jenis dagangannya saja yang berbeda. Jika ada peraturan yang jelas sejak awal, akan mengurangi dampak negatif di kemudian hari. Jadi perkembangan bisnis UMKM itu bagus, tetapi berkembangnya suatu usaha tentu tidak boleh merugikan pihak yang lain," katanya. **(Dhi)-f**